



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir BottaE., 03 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx,, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pao, 20 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx,, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saharuddin, S.H.** advokat/penasehat hukum pada LBH Citra Keadilan Pare-Pare yang beralamat di di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 176/SK/2021/PA.Prg Tanggal 26 April 2021, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 9 September 2001 di xxxxxxxx xxxx Kab. berdasarkan kutipan akta nikah NO. 130/18/IX/2001 tertanggal 5 September 2001 yang dikeluarkan oleh KUA mattiro bulu xxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut bernama Mutmainna Binti Abd. Hamid, tempat tanggal lahir Pao 18 Juni 2002 (sekarang 18 tahun 10 bulan) pekerjaan Mahasiswi alamat bertempat kediaman Pao, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan menikah pada tanggal 6 juni 2021 dengan seorang lelaki bernama: Romi Santuri Bin Rustan telah memenuhi syarat- syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum islam , maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yaitu Mutmainna Binti Abd. Hamid belum cukup umur/ belum cukup usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang sebagaimana surat penolakan Kawin secara tertulis Nomor B. 199/ Kua, 21.17.06/Pw-01/04/2021 tertanggal 20 April 2021. Dan dan surat Pemkab Pinrang Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 082/P2PT2A/IV/2021 tertanggal 21 April 2021.
3. Bahwa anak kandung para Pemohon bernama: Mutmainna Binti Abd. Hamid sudah mampu menjadi xxx xxxxx xxxxxx dalam keluarga yang baik.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Mahram, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum islam.
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut belum pernah menikah dan calon suaminya belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama sekitar 1 tahun lamanya sehingga para Pemohon selaku orang tuanya jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga pihak keluarga calon keluarga calon pengantin pria telah melamar dan lamarannya tersebut telah diterima oleh keluarga besar para Pemohon dengan acara adat Mappettu ada, dan telah disepakati bersama akan dilasanakan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2021 calon mempelai wanita baru berumur 18 tahun 11 bulan 12 hari pada waktu penetapan hari pernikahan.
7. Bahwa setelah acara Mappettu ada Para Pemohon telah mengurus surat “surat kelengkapan berkas pernikahan ternyata Para Pemohon baru mengetahui jika ketentuan calon pengantin wanita harus cukup umur 19 tahun sedangkan pada tanggal 6 juni 2021 tersebut calon pengantin perempuan/ Mutmainna Binti Abd. Hamid baru berusia 18 tahun 11 bulan 12 hari (kurang 12 hari 19 tahun umur Mutmainna Binti Abd. Hamid) tersebut berdasarkan penentuan hari pernikahan.
8. Bahwa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atas kesepakatan bersama keluarga besar kedua mempelai calon pengantin dari acara adat Mappettuada tersebut.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak para Pemohon Mutmainna Binti Abd. Hamid) dengan seorang laki-laki tersebut maka para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada ketua pengadilan agama Pinrang Cq, mengadili perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon (Mutmainna Binti Abd. Hamid) untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki bernama (Romi Santuri Bin Rustan).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315030311800001 tanggal 08 Oktober 2012 atas nama Abd. Hamid (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315036001820004 tanggal 08 Nopember 2012 atas nama Darmi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315032807097693 tanggal 06 Nopember 2013 atas nama Abd. Hamid (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/18/IX/2001 tanggal 05 September 2001 atas nama Abd. Hamid dan Darmi (Para Pemohon) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315035806020001 tanggal 01 September 2020 atas nama Mutmainna (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-06112013-0030 tanggal 06 Nopember 2013 atas nama Mutmainna (anak Para Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315102407950002 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Romi Santuri (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2091/AK/2004 tanggal 08 Juni 2004 atas nama Romi Santuri (calon suami anak Para Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

9. Fotokopi Surat Pertimbangan Rekomendasi Nikah Nomor 082/P2TP2A/IV/2021 tanggal 21 April 2021, atas nama Mutmainna dan Romi Santuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-199/KUA.21.17.06/PW.01/04/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Mutmainna, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan kenal Pemohon I karena Pemohon I ipar saksi;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Mutmainna Binti Abd. Hamid;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Romi Santuri Bin Rustan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai supir mobil pemanen padi;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon bisa mencapai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiap kali panen;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai mempunyai kedekatan satu sama lain karena sudah pacaran satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga Romi Santuri Bin Rustan sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Mutmainna Binti Abd. Hamid;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Mutmainna Binti Abd. Hamid selain Romi Santuri Bin Rustan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Romi Santuri Bin Rustan tidak bisa ditunda lagi karena mereka sudah sering pergi bersama-sama;
- Bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Romi Santuri Bin Rustan, menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan kenal Pemohon II karena Pemohon II ipar saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Mutmainna Binti Abd. Hamid;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Romi Santuri Bin Rustan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai supir mobil pemanen padi;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon bisa mencapai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiap kali panen;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai mempunyai kedekatan satu sama lain karena sudah pacaran satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga Romi Santuri Bin Rustan sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Mutmainna Binti Abd. Hamid;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Mutmainna Binti Abd. Hamid selain Romi Santuri Bin Rustan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Romi Santuri Bin Rustan tidak bisa ditunda lagi karena mereka sudah sering pergi bersama-sama;
- Bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Romi Santuri Bin Rustan, menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Mutmainna Binti Abd. Hamid, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Romi Santuri Bin Rustan, umur 25 tahun, karena sudah pacaran lebih satu tahun dan sering jalan berdua-an, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6, P.10 dan P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2 menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga Kelurahan Padaidi, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6 para Pemohon adalah Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon dan tertera tanggal

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak para Pemohon bernama Mutmainna binti Abd. Hamid, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 para Pemohon adalah Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 para Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, dan Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon yang Romi Santuri Bin Rustan saat ini berusia 25 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Pemohon adalah Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxx xxxxxxxx bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Romi Santuri Bin Rustan. Ramang mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxx xxxxxxxx dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa bukti P-10 dengan alasan anak para Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-10 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Romi Santuri Bin Rustan. mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Mutmainna Binti Abd. Hamid, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Romi Santuri Bin Rustan, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih satu tahun dan sering jalan berduaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mattiro bulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 25 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia #0607# tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رُوبه الجماعة.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Artinya: *Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.* Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ رِيَّتَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رَوِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Artinya: *Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi.* Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي. رَوِيهِ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: *Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya.* Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Mutmainna Binti Abd. Hamid, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Romi Santuri Bin Rustan, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mutmainna Binti Abd. Hamid** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Romi Santuri Bin Rustan**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Rusni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rusni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)